

**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKj-IP)
2018**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 9 indikator kinerja utama, terdapat 6 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pangkajene Sidenreng, 21 Januari 2019
Plt. Kepala Badan Kesbang dan Politik

Drs. H. ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19670505 200212 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu 6 indikator Sedangkan 3 indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 50%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud dan Tujuan	1
I.3 Gambaran Umum Organisasi	2
I.4 Isu strategis	8
I.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa & Politik	9
I.6 Komposisi SDM Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
II.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
II.3 Indikator Kinerja Utama	19
II.4 Rencana Anggaran Tahun 2018	20
BAB III AKUNTABILITAS	23
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	23
III.2 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi SDM Berdasarkan Gender	11
Tabel I.2	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	11
Tabel I.3	Komposisi PNS Menurut jenjang Eselon dan Golongan	11
Tabel II.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13
Tabel II.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16
Tabel II.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017	17
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017	18
Tabel II.5	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19
Tabel II.6	Rencana Belanja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2017	21
Tabel II.7	Alokasi perSarasan Tahun Anggaran 2017	21
Tabel III.1	Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23
Tabel III.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel III.3	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	28
Tabel III.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	I.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10
--------	--	----

BAB I PENDAHULAN

I.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

I.2 Maksud dan Tujuan

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah

daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

I.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 Pasal 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 1. Subbag Perencanaan
 2. Subbag Keuangan
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Hubungan antar Lembaga
 1. Sub bidang Kelembagaan
 2. Sub bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Bidang Kesatuan Bangsa
 1. Sub bidang Pembauran
 2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPT Badan

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

A. Kepala Badan:

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- 4) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- 1) merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan;
- 4) mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 6) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 7) mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- 8) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 9) merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- 10) merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 11) merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 12) mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- 13) melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;

- 14) melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 15) menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- 16) menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 17) menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- 18) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 19) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretaris:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- 2) pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 3) pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- 7) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
- 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
- 11) Melaksanakan melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- 12) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
- 13) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 15) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- 16) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 17) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 19) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 20) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 21) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Hubungan Antar Lembaga:

Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang hubungan antar lembaga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;

- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan hubungan organisasi kemasyarakatan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Antar Lembaga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan perumusan teknis operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan dan kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik;
- 8) menyelenggarakan dan mengoordinasikan serta melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dalam Skala Kabupaten;
- 9) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat;
- 10) menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;
- 11) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, kelembagaan Partai Politik, Budaya dan pendidikan Politik, Fasilitasi pemilu, Pilpres dan Pilkada Skala Kabupaten;

- 12) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Kesatuan Bangsa:

Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembauran dan wawasan kebangsaan.
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- 1) menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa sehingga berjalan lancar;
- 3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kesatuan Bangsa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam skala Kabupaten;
- 8) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat, Perbatasan dan Tenaga Kerja, Penanganan

- Konflik Pemerintahan, Penanganan Konflik Sosial, Pengawasan orang asing dan Lembaga asing skala Kabupaten;
- 9) menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dibidang Ketahanan Idiologi negara, wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
 - 10) menyelenggarakan dan mengoordinasikan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan Idiologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan dalam Skala Kabupaten;
 - 11) menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan dan masyarakat dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelkam, Bina Masyarakat perbatasan, Tenaga Kerja, Penanganan Komplik Pemerintahan dan Sosial, Pengawasan Orang Asing dan lembaga Asing skala Kabupaten;
 - 12) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

I.4 Isu Strategis

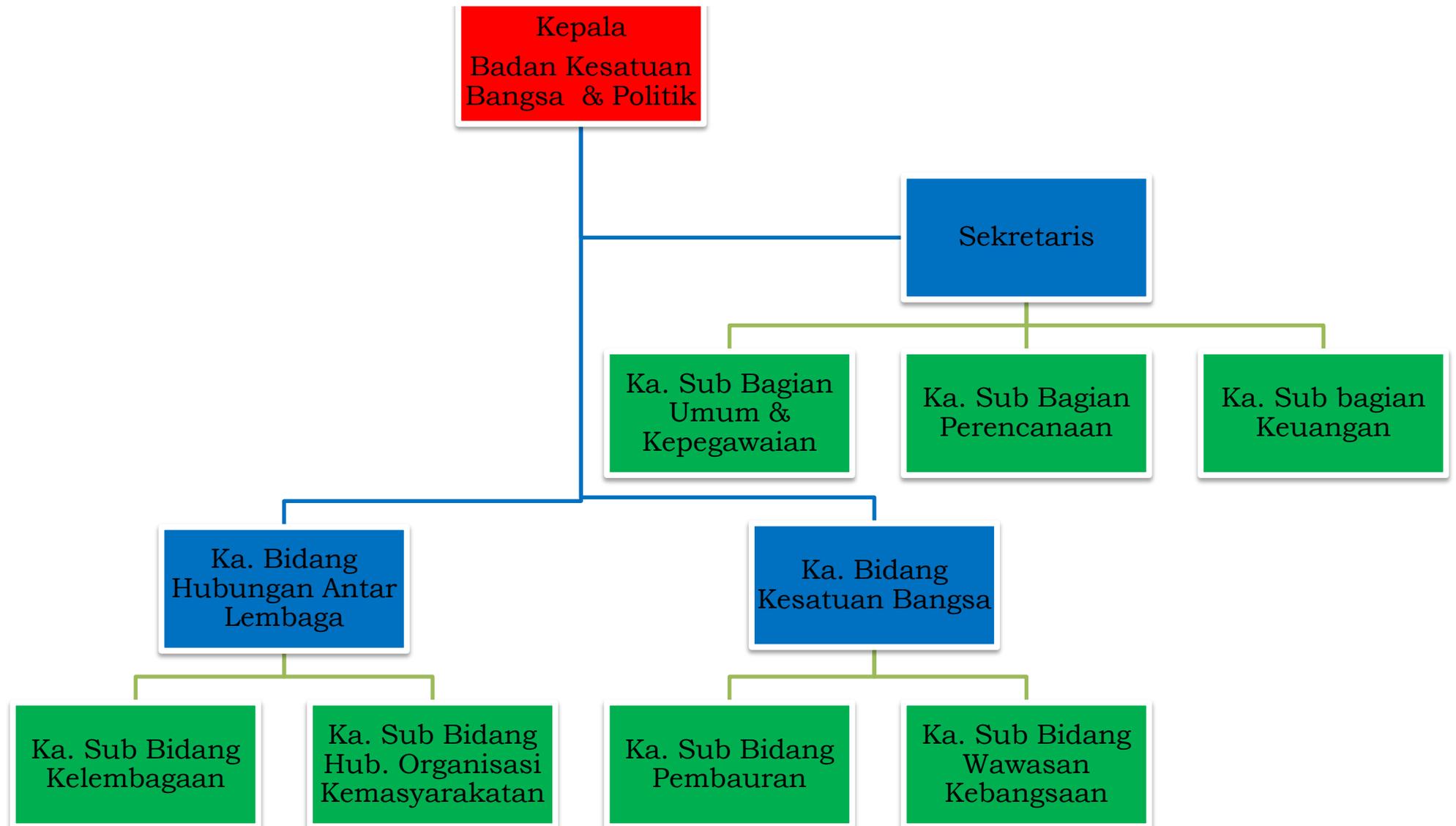
Isu Strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- 1) Tingkat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih rendah, sebagai akibat dari adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manasia dan sarana prasarana.
- 2) Kurangnya tenaga profesional yang paham dalam bidang tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan politik.
- 3) Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan :
 - Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air.
- 4) Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika dan rendahnya pemahaman terhadap arti penting orientasi serta visi bersama mengenai integritas bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional.

- 5) Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Bermunculnya paham-paham radikal, sapatisme dan terorisme
- 7) Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum.
- 8) Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum optimalnya penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

I.5 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Gambar 1.
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



I.6 Komposisi SDM Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh sumber daya yang telah ada. Diantaranya sebagai berikut:

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Jumlah personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada pada saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Komposisi SDM Berdasarkan Gender

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN	
		L	P
1.	Struktural	6	3
2.	Fungsional	-	-
3.	Staff	7	3
4.	Tenaga Sukarela	2	9

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, sangat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup handal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas. Komposisi PNS Menurut jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.2
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN			
		SLTA	D3	S1	S2
1.	Struktural	-	-	6	3
2.	Fungsional	-	-	-	-
3.	Staff	2	1	5	2

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon dan Golongan.

Berikut komposisi PNS menurut jenjang Eselon dan golongan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel I.3
Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon dan Golongan

NO	URAIAN	ESELON			GOLONGAN			
		II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Struktural	-	2	7	-	-	5	4
2.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
3.	Staff	-	-	-	-	3	7	-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Visi dan Misi

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Badan Kesatuan Bangsa untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

VISI:

Terwujudnya Kualitas Kehidupan yang Demokratis, Partisipatif, Harmonis dalam Memberdayakan Masyarakat Berbangsa dan Bernegara.

MISI:

1. Mengembangkan sistem politik yang adil dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta meningkatkan kinerja kemandirian infrastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan integritas, persatuan dan kesatuan pembauran bangsa.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

B. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan sistem politik yang adil dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta meningkatkan kinerja kemandirian infrastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan:

1. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis serta dalam suasana yang demokratis.
2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi, penyelesaian permasalahan aktual yang

dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang professional dalam menjalankan fungsi - fungsi organisasinya.

Misi 2: Meningkatkan integritas, persatuan dan kesatuan pembauran bangsa.

Tujuan:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama.

Misi 3: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Tujuan:

1. Terciptanya suasana kehidupan masyarakat kabupaten sidenreng rapping yang penuh kedamaian.

C. Tujuan dan Indikator Kinerja

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Tujuan dan Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa & Politik

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis serta dalam suasana yang demokratis.	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	org	0	1.030
	2. Jumlah Parpol yang di bina	Parpol	11	11

2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi, penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.	1. Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	dok	12	60
	2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi/ Seminar Bahaya Narkoba	Keg.	0	28
3. Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang professional dalam menjalankan fungs- fungsi organisasinya.	1. Jumlah SDM organisasi yang telah diberikan pemahaman	org	0	200
4. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama.	1. Jumlah forum/pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan	Forum/ pokja	0	15
	2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	Keg.	0	9
	3. Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan	org.	0	590
5. Terciptanya suasana kehidupan masyarakat kabupaten sidenreng rapping yang penuh kedamaian	1. Jumlah kegiatan deteksi dini	Keg.	0	9

D. Sasaran dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis serta dalam suasana yang demokratis.

Sasaran :

1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

Tujuan 2 Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi, penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sasaran :

1. Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
2. Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Tujuan 3 Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang professional dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.

Tujuan 4 Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama.

Sasaran :

1. Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.

Tujuan 5 Terciptanya suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang penuh kedamaian.

Sasaran :

1. Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel II.2
 Sasaran dan Indikator Kinerja
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	org	0	1.030
	2. Jumlah Parpol yang di bina	Parpol	11	11
2. Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.	1. Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	Dok.	12	60
3. Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.	1. Jumlah kegiatan sosialisasi / seminar / penyuluhan bahaya narkoba.	org	0	28
4. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.	1. Jumlah SDM organisasi yang telah diberikan pemahaman	Kegiatan	0	200
5. Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa,	1. Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.	Forum/ Pokja	0	15

adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.	2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	Keg.	0	9
6. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	1. Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan	org	0	590
7. Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1. Jumlah kegiatan deteksi dini	Kegiatan	0	9

E. Program untuk pencapaian sasaran.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel II.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.	- Program Pendidikan Politik Masyarakat.
2. Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi actual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat	- Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.	-
4. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.	-
5. Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras,	- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.	- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
6. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.	- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	org	640
	2. Jumlah Parpol yang di bina	Parpol	11
2. Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi actual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.	1. Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	Dokumen	12
3. Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa & masyarakat umum.	1. Jumlah Kegiatan Sosialisasi/ Seminar penyuluhan Bahaya Narkoba.	Kegiatan	-

4. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.	1. Jumlah SDM Organisasi yang telah diberikan pemahaman	org	-
5. Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.	1. Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.	Forum/ Pokja	3
	2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	Keg.	1
6. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	1. Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan	orng	585
7. Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1. Jumlah kegiatan deteksi dini	Keg.	4

II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel II.5
IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	org
	2. Jumlah Parpol yang dibina	Parpol

2. Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi actual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.	1. Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	Dok.
3. Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.	1. Jumlah kegiatan sosialisasi/seminar/ penyuluhan bahaya narkoba	Keg.
4. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.	1. Jumlah SDM Organisasi yang telah diberikan pemahman	
5. Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.	1. Jumlah forum/pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan	Forum/ pokja
	2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	Keg.
6. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	1. Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan	org
7. Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1. Jumlah kegiatan deteksi dini	Keg.

II.4 Rencana Anggaran Tahun 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 2.769.744,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.6
Rencana Belanja SKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA 2017

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.271.062.000	46%
2	Belanja Langsung	1.498.682.000	54%
Jumlah		2.769.744.000	100 %

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel II.7
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1. Meningkatkan kapasitas dan pendayagunaan sumberdaya aparatur pemerintah yang berkesinambungan.	1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	505.193.500	33,71%
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
2. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	319.177.500	21,30%
	2. Jumlah Parpol yang di bina		
3. Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi actual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.	1. Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	147.798.000	9,86%
4. Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.	1. Jumlah Kegiatan Sosialisasi/ Seminar Bahaya narkoba.	-	0 %

5. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.	1. Jumlah SDM Organisasi yang telah diberikan pemahman	-	0%
6. Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.	1. Jumlah forum / Pokja yang melakukan pemahaman wawasan kebangsaan.	117.939.000	7,87%
	2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahan		
7. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.	1. Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman waawasan kebangsaan	225.000.000	15,01%
8. Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.	1. Jumlah kegiatan deteksi dini	183.574.000	12,25%
TOTAL		1.498.682.000	100%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 1.498.682.000,- dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran “Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan” dengan besaran 33,71%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran “Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.” yaitu sebesar 21,30%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran “Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.” sebesar 7,87% dari total anggaran belanja langsung.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	org.	640	640	100%
2.	Jumlah Parpol yang dibina	Parpol	11	11	100%
3.	Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	Dok.	12	12	100%
4.	Jumlah kegiatan sosialisasi/seminar/pe-yuluhan bahaya narkoba	Keg.	-	-	0%

5.	Jumlah SDM organisasi yang telah diberikan pemahaman	org.	-	-	0%
6.	Jumlah forum/pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan	Forum/pokja	3	3	100%
7.	Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	Keg.	1	-	0%
8.	Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan	org.	585	585	100%
9.	Jumlah kegiatan deteksi dini	Keg.	4	4	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak 9 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 9 IKU di atas, menunjukkan bahwa 6 indikator telah memenuhi kriteria “Sangat Tinggi” yaitu 100%. Indikator dengan kriteria “Sangat Rendah” dengan capaian 0% adalah 3 indikator.

Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan di tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1:

Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda

a. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	Org.	640	640	100
	2. Jumlah parpol yang di bina	Parpol	11	11	100
RATA - RATA CAPAIAN					100

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan jumlah parpol yang dibina, keduanya telah memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	-	-	-	100	100
2. Jumlah parpol yang di bina	-	-	-	100	100
Rata -Rata Capaian	-	-	-	100	100

Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2017, maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran “Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda” sudah mencapai 100%.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah	Rata-Rata realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Capaian %
1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	org	1.030	1.030	100%
2. Jumlah parpol yang di bina	Parpol	11	11	100%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah, kedua indikator telah mencapai target jangka menengah yaitu 100%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran “Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.” disebabkan karena terpenuhinya alokasi anggaran APBD guna merealisasikan kegiatan- kegiatan yang mendukung program dan sasaran diatas.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran “Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.” ini adalah sebesar Rp. 319.177.500,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar 301.142.500,- atau 94,35%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 5.65%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, Tokoh agama dan tokoh pemuda ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan. Program Pendidikan Politik Masyarakat, meliputi kegiatan: Penyuluhan Kepada Masyarakat (Sosialisasi Undang-Undang Pemilu no.7 Tahun 2017), Penyusunan Administrasi Bantuan Parpol.

Sasaran 2:

Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

a. Perbandingan antar target dan realiasi kinerja tahun ini.

Pencapaian Indikator kinerja untuk sasaran “Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.” tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.	Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	Dok.	12	12	100
RATA - RATA CAPAIAN					100

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini yaitu “ jumlah dokumen laporan Intelijen dimana capaian realisasi sebesar 100% .

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	100	100	100	100	100
Rata -Rata Capaian	100	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran “Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sudah mencapai 100%.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah	Rata-Rata realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Capaian %
Jumlah dokumen laporan intelijen daerah	Dokumen	60	60	100%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka indikator ini sudah mencapai target yaitu sebesar 100%

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran ini didukung dengan adanya alokasi anggaran yang memadai pada program/kegiatan yang mendukung sasaran ini serta koordinasi para anggota Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran “ Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.” ini adalah sebesar Rp. 147.798.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 121.750.000 atau 82,38%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 17,62%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat” ini adalah sebanyak 1 program dan 1 kegiatan, yaitu: program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan 1 kegiatan yaitu: Penguatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Sasaran 3:

Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum

a. *Perbandingan antar target dan realiasi kinerja tahun ini.*

Pencapaian Indikator tahun 2018 untuk sasaran ini secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum	Jumlah kegiatan sosialisasi /seminar/ penyuluhan bahaya narkoba	Keg.	-	-	0%
RATA - RATA CAPAIAN					0%

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini baik target maupun realisasi tidak tercapai yaitu 0%.

b. *Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Jumlah kegiatan sosialisasi/seminar/penyuluhan bahaya narkoba	0	0	100	100	0
Rata -Rata Capaian	0	0	100	100	0

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka target kinerja di tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 0%, dibandingkan dengan beberapa tahun lalu dimana capaian kinerja sebesar 100% untuk tahun 2016 dan 2017.

c. *Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah	Rata-Rata realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Capaian %
1. Jumlah kegiatan sosialisasi /seminar/ penyuluhan bahaya narkoba	Kegiatan	28	14	50

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah, maka indikator hanya mencapai target jangka menengah sebesar 50%. Hal ini dikarenakan target kinerja di tahun 2018 adalah 0% .

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Kegagalan pencapaian kinerja pada indikator ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dimana pada tahun 2018 merupakan tahun politik sehingga pengalokasian anggaran lebih difokuskan pada anggaran kegiatan politik. Meskipun dari segi penganggaran sebesar 0%, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap memasukkan materi penyuluhan tentang narkoba pada kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat penyuluhan/sosialisasi, sehingga masyarakat kab. Sidenreng Rappang tetap mendapatkan pemahaman tentang bahaya narkoba.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran “Pelaksanaan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.” ini adalah sebesar Rp.0,- sehingga realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Baik rata-rata capaian kinerja maupun tingkat efisiensi sebesar 0%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian sasaran pelaksanaan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum ini adalah sebanyak 1 program dan 1 kegiatan, yaitu: program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Sasaran 4:

Meningkatkan kualitas SDM, organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya

a. Perbandingan antar target dan realiasi kinerja tahun ini.

Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.	1. Jumlah SDM Organisasi yang telah diberikan pemahaman	org.	-	-	0%
RATA - RATA CAPAIAN					0%

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini baik target maupun realisasi tidak tercapai yaitu 0%.

b. *Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah SDM Organisasi yang telah diberikan pemahaman	0	0	0	0	0
Rata -Rata Capaian	0	0	0	0	0

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 0%.

c. *Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah	Rata-Rata realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Capaian %
Jumlah SDM Organisasi yang telah diberikan pemahaman	Ormas	200	0	0%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD, indikator kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.*

Kegagalan dan pencapaian target kinerja dikarenakan keterbatasan dalam penganggaran, dimana anggaran pada tahun 2018 lebih diprioritaskan

pada kegiatan di bidang politik. Kegiatan pembinaan ormas tetap dilaksanakan melalui penerbitan SKT ormas, monitoring kegiatan ormas, serta tetap memasukkan materi tentang pembinaan ormas pada kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga ormas/masyarakat bisa mendapatkan pemahaman tentang Ormas.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Peningkatan kualitas SDM, organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya. ini adalah sebesar Rp. 0,- sehingga realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Baik rata-rata capaian kinerja maupun tingkat efisiensi sebesar 0%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian sasaran adalah program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Sasaran 5:

Meningkatkan Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.

a. Perbandingan antar target dan realiasi kinerja tahun ini.

Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras. Suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.	1. Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan	forum	3	3	100%
	2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	Keg.	1	-	0%
RATA - RATA CAPAIAN					50%

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini sudah mencapai target yaitu 100% untuk jumlah forum yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan sedangkan indikator yang belum mencapai target adalah pembinaan FKUB, FPK di tingkat kecamatan.

b. *Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman	66,6	33,3	33,3	100	100
2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	100	50	50	66,6	0
Rata -Rata Capaian	83,3	41,65	41,65	83,3	50

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian terendah terdapat pada tahun 2015-2016 yaitu sebesar 41,65% dan capaian tertinggi terjadi di tahun 2014 dan 2017 yaitu sebesar 83,3%. Pada tahun 2018, capaian kinerja pada sasaran ini hanya sebesar 50% .

c. *Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah	Rata-Rata realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Capaian %
1. Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman	Forum/Pokja	15	10	66,6
2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	Keg.	9	4	44,4

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, maka pada indikator “Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman” adalah sebesar 66,6% dan untuk indikator “jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman” hanya mencapai sebesar 44,4%.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.*

Penurunan pencapaian indikator disebabkan adanya keterbatasan anggaran pada kegiatan – kegiatan yang mendukung sasaran ini, dimana anggaran pada tahun 2018 lebih diprioritaskan pada sasaran kegiatan di bidang politik.

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran “Meningkatkan Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.” Pada indikator forum yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan adalah sebesar Rp.78.764.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.70.622.500,- atau 89,66%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 10,34%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatkan Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing” ini adalah sebanyak 2 program dan 3 kegiatan, yaitu: program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Penguatan Tim PAKEM dalam rangka koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan di daerah serta program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Sedangkan kegiatan yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian target adalah kegiatan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di tingkat Kecamatan.

Sasaran 6:

Meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.

a. Perbandingan antar target dan realiasi kinerja tahun ini.

Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.	Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan.	org.	585	585	100%
RATA - RATA CAPAIAN					100

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini mencapai target yaitu sebesar 100%.

b. *Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Penyelenggaraan sosialisasi, talkshow, seminar, dialog dan FGD lainnya.	-	-	-	100	100
Rata -Rata Capaian	-	-	-	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja pada sasaran ini terjadi di tahun 2018 dan di tahun sebelumnya tidak terealisasi atau hanya 0%

c. *Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah	Rata-Rata realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Capaian %
Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan	org.	590	1.680	284,75

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah indikator pada sasaran ini, mencapai target sebesar 284,75%.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.*

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran ini dikarenakan adanya pemenuhan anggaran guna mendukung sasaran kinerja di akhir tahun 2018.

e. *Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.*

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.” ini adalah sebesar Rp.225.000.000 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.222.535.000,- atau 98,90%. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% berarti tingkat efisiensi sebesar 1,10%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya Pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.” ini adalah sebanyak 2 program yaitu program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan yaitu: Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

Sasaran 7:

Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Perbandingan antar target dan realiasi kinerja tahun ini.

Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.	Jumlah kegiatan deteksi dini	Keg.	4	4	100%
RATA - RATA CAPAIAN					100%

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini telah mencapai target adalah Jumlah kegiatan deteksi dini yaitu sebesar 100% . kegiatan yang mendukung tercapainya target realisasi berupa: Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan penyuluhan kesadaran bela negara, kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah, kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta desk pilkada.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kegiatan deteksi dini	-	-	-	100	100
Rata -Rata Capaian	-	-	-	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini mengalami peningkatan ditahun 2018 yaitu sebesar 100%

c. *Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja target Jangka Menengah	Rata-Rata realisasi Sampai dengan Tahun Ini	Capaian %
Jumlah kegiatan deteksi dini kenyamanan lingkungan	Keg.	9	5	55,56%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah, maka capaian indikator sudah mencapai target sebesar 55,56%.

d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.*

Peningkatan capaian target kinerja di akhir periode renstra dikarenakan adanya komitmen dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengupayakan pemenuhan target di tahun 2018 meskipun pencapaian target sasaran hanya 55,56% di akhir tahun.

e. *Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.*

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran “Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.” ini adalah sebesar Rp.183.574.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 163.874.000 atau 89,27%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi sebesar 10,73%

f. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.” ini adalah sebanyak 2 program yaitu Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan 1 kegiatan yaitu Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. Program yang kedua adalah Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah, kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta desk pilkada.

III.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 88,33% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran “Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda” sebesar 98,90%, sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan di sasaran “Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat” sebesar 82,38%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

NO	SASARAN/INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan						
	- pelayanan adm. Perkantoran	12	12	100%	443.085.500	408.044.509	92,09%
	- Sarana dan Prasarana apaatur	12	12	100%	62.108.000	35.786.939	57,62%
1.	Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda						
	- Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	640 org	640 org	100%	319.177.500	301.142.500	94,35%
	- Jumlah parpol yang dibina	11 parpol	11 parpol	100%			
2.	Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat						
	- Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	12 dok	12 dok	100%	147.798.000	121.750.000	82,38%
3.	Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.						
	- Jumlah kegiatan sosialisasi/seminar penyuluhan bahaya narkoba	- keg.	- keg.	0%	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.						
	- JumlahSDM organisasi yang telah diberikan pemahaman	-	-	0%	-	-	0%
5.	Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.						
	- Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan	3 forum	3 forum	100%	78.764.000	70.622.500	89,66%
	- Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	1 keg	-	0%	39.175.000	-	0%
6.	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda						
	- Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan	585 org	585 org	100%	225.000.000	222.535.000	98,90%
7.	Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang						
	- Jumlah kegiatan deteksi dini	4keg.	4 keg.	100%	183.574.000	163.874.000	89,27%

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya mencapai 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 9 indikator, menunjukkan pencapaian yang sama yaitu 100%, yaitu sebanyak 6 indikator sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran “Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda”, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 98,90% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel III.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik.	100	94,35	5,65
	2. Jumlah Parpol yang di bina			
2. Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam memberikan informasi aktual berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.	1. Jumlah Dokumen Laporan Intelijen Daerah	100	82,38	17,62

3.	Melaksanakan penyuluhan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.	1. Jumlah Kegiatan Sosialisasi/ Seminar penyuluhan Bahaya Narkoba.	-	-	-
4.	Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.	1. Jumlah SDM organisasi yang telah diberikan pemahaman	-	-	-
5.	Meningkatkan interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing.	1. Jumlah Forum/Pokja yang memberikan pemahaman wawasan kebangsaan.	100	89,66	10,34
		2. Jumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman	-	-	-
6.	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda	1. Jumlah masyarakat yang telah diberikan pemahaman wawasan kebangsaan.	100	98,90	1,10
7.	Meningkatkan rasa keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang	1. Jumlah Kegiatan deteksi dini	100	89,27	10,73

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa ,,

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.